

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN**

KAMPAR

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*

DESKA KURNIA

NPM : 147310530

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nama : Deska Kurnia
NPM : 147310530
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pekanbaru, 26 Desember 2018

Pembimbing I Pembimbing II

PEKANBARU

Prof.Dr.H. Yusri Munaf, SH., M.Hum Data Wardana, S.Sos., M.IP

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Mulianto, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Deska Kurnia
NPM : 147310530
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini secara kesefuruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah. oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 10 Januari 2019

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ranggi Ade Febrina, S.IP., M.Si

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si
Anggota,

Mengetahui
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

Data Wardana, S.Sos., M.IP

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1209/UIR-FS/KPTS/2018
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Deska Kurnia
N P M : 147310530
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

1. Dr. Ranggi Ade Febrina, S.IP.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Sylvina Rusadi, S.Sos.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Sri Maulidiah, S.Sos.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Prof.Dr.H. Yusril Mufatih, SH,M.Hum	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Data Wardana, S.Sos.,M.P	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Rijalul Fikri, S.Sos.,MA	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekefiran segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 29 Desember 2018
An. Dekan

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si
Wakil Dekan I.Bd. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1018-FS/Sp/2018 tanggal 29 Desember 2018 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini Senin tanggal 31 Desember 2018 jam 13.00 - 14.00 Wib bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Deska Kurnia
NPM : 147310530
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
Nilai Ujian : Angka : " 95 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Syivina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum	Anggota	4. 
5.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Anggota	5. 
6.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 31 Desember 2018

An. Dekan


B. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Deska Kurnia
NPM : 147310530
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Kecamatan Srik Hulu Kabupaten Kampar.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 04 Februari 2019
An, Tim Penguji

Ketua, Sekretaris,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Pembantu Dekan I Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan naskah penulisan skripsi ini yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.” Salam shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikamah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman. Penulis skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar keserjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan penulis tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Prof. Dr. H. Yusri Munaf, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing I (satu) yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Data Wardana, S.Sos., M.IP selaku dosen pembimbing II (dua) yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi.
8. Kepada Ayahanda Tercinta Dalwakir Rahmaini dan Ibunda Tercinta Jarunai yang telah memberikan doa restu, semangat, motivasi dan limpahkan kasih sayangnya yang tiada henti dan tidak ternilai harganya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selalu mendoakan, dan tidak pernah letih memberikan motivasi dan dukungan secara moril maupun mteril selama penulis menyelesaikan studi. Kepada orang-orang yang saya sayangi Teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas G Angkatan

2014 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi, penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya.

9. Kepada Pegawai Di Desa Kantor Kubang Jaya yang telah memberikan saya izin untuk di teliti, serta telah mempermudah dalam pengambilan data yang di gunakan dalam penelitian ini agar penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan jelas.

Akhir kata hanya ucapan terimakasih yang bisa diberikan oleh penulis Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga naskah skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahitaufikwalhidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 16 Januari 2019

Penulis

Deska Kurnia

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA KONFERENSI SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
SURAT PERNYATAAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT.....	xx
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	12
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	14
A. Studi Kepustakaan.....	14
1. Konsep Pemerintahan.....	14
2. Konsep Fungsi Pemerintahan.....	18
3. Konsep Pemerintahan Daerah	20
a. Pengertian Pemerintah Daerah.....	20
b. Pengertian Pemerintahan Daerah	21
4. Konsep Pemerintahan Desa.....	22
a. Pemerintahan Desa.....	22
b. Badan Permusyawaratan Desa	23
5. Konsep Peranan.....	24
6. Konsep Pembangunan.....	26

7. Konsep Otonomi Daserah	29
B. Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pikir	33
D. Konsep Operasional	34
E. Operasional Variabel.....	35
F. Teknik Pengukuran	36
BAB III : METODE PENELITIAN.....	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Populasi dan Sampel	40
D. Teknik Penarikan Sampel	41
E. Jenis dan Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Analisa Data.....	43
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	44
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	45
A. Deskripsi Umum Wilayah.....	45
B. Kondisi Umum Sumber Daya Manusia (Penduduk)	46
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Identitas Responden	51
B. Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	54
C. Hambatan-Hambatan Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya	69
BAB VI : PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel I.1	Skala Prioritas Pembangunan di Desa Kubang Jaya	9
Tabel I.2	Pembangunan Yang Dilakukan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Periode 2015-2017	10
Tabel II.1	Tabel Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian Penulis Dengan Penelitian Terdahulu	31
Tabel II.2	Konsep Operasional Variabel Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.	35
Tabel III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.	40
Tabel III.2	Jadwal Waktu Kegiatan Penelitaian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.	44
Tabel IV.1	Luas Lahan Kelurahan Di Kecamatan Siak Hulu.....	45
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Siak Hulu Tahun 2017.....	46
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur.....	47
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan	48
Tabel IV.5	Jumlah penduduk Menurut Pekerjaan.....	49
Tabel V.1	Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Umur.....	51
Tabel V.2	Jumlah Keseluruhan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	52
Tabel V.3	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	53
Tabel V.4	Sebaran Tanggapan Responden Terhadap Indikator Penyusunan Rencana Pada Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.	56
Tabel V.5	Sebaran Tanggapan Responden Terhadap Indikator Penetapan Rencana Pada Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	60

Tabel V.6	Sebaran Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pada Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	63
Tabel V.7	Sebaran Tanggapan Responden Mengenai Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Pada Penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	67
Tabel V.8	Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Pikiran Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran I	Daftar Wawancara.....	75
Lampiran II	Daftar Kuisisioner.....	78
Lampiran III	Data informan dan Data Responden.....	82
Lampiran IV	Struktur Organisasi Di Desa Kubang Jaya.....	85
Lampiran V	Dokumentasi Penelitian.....	86
Lampiran VI	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	93
Lampiran VII	Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi Nomor 236/A_UIR/5-FS/2019	106
Lampiran VIII	Sk Dekan Fisipol UIR No. 241/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulis Skripsi an. Deska Kurnia.....	107
Lampiran IX	Surat Mohon Rekomendasi Riset No. 1491/UIR/27-FS/2018	108
Lampiran X	Surat Rekomendasi No. 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/14631 Pelaksanaan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Skripsi.....	109
Lampiran XI	Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rekomendasi No. 070/KKBP/2018/849 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	110
Lampiran XII	Surat dari Kantor Camat Siak Hulu Rekomendasi No. 070 / PM – SH / 2018 / 251 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	111
Lampiran XIII	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di Kantor Desa Kubang Jaya No. 474/KJ/XII/2018/42....	112

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deska Kurnia
NPM : 147310530
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari di temukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 27 Desember 2018
Pelaku Pernyataan



Deska Kurnia

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

PERANAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA KUBANG JAYA KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Deska Kurnia

Kata Kunci : Peranan, Kepala Desa, Pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana Peran Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Sesuai dengan permasalahan maka tipe penelitian adalah *Survey Deskriptif* dengan menggunakan *Metode Kuantitatif*. Penelitian ini dilakukan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi bahwasannya peran kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Kubang Jaya belum terlaksana dengan baik dan jauh dari harapan masyarakat selama ini seperti yang tertera pada latar belakang masalah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Kubang Jaya berkategori baik hal ini terlihat dari 26 orang atau sebesar 52% menyatakan bahwa secara keseluruhan indikator Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya sudah cukup baik karena berada persentase 34-66%. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya yakni : Kurangnya biaya dari APBDes dan belum mendapatkan lokasi yang tepat di desa untuk pembangunan fasilitas umum desa Kubang Jaya dan Kurangnya kesadaran masyarakat kubang jaya dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa Kubang Jaya, hal ini dibuktikan dengan masyarakat desa Kubang Jaya dominan tidak hadir ketika diundang mengadakan rembuk desa atau acara kecamatan lainnya.

**ROLE OF VILLAGE HEAD IN IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT
IN KUBANG JAYA VILLAGE, KECAMATAN SIAK HULU, KAMPAR
DISTRICT**

ABSTRACT

Deska Kurnia

Keywords : Role, Village Chief, Development.

This study aims to see and find out the extent of the Role of Village Heads in Development in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar District. In accordance with the problem, the type of research is Descriptive Survey using the Quantitative Method. This research was conducted in Kubang Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar District. The reason the researchers took the location of this study was based on the phenomenon that the role of the village head in the implementation of development in Kubang Jaya Village has not been well implemented and far from the expectations of the community as stated in the background of the problem. Based on the results of research and discussion on the Role of Village Heads in the Development of Kubang Jaya Village in good category this can be seen from 26 people or 52% stating that the overall indicator of the Role of Village Heads in Kubang Jaya Village Development is quite good because it is at 34-66%. The obstacles found in the Role of the Village Chief in the Development of Kubang Jaya Village are : Lack of costs from the APBDes and not getting the right location in the village for the construction of Kubang Jaya village facilities and lack of awareness of the Kubang Jaya community in active participation in Kubang Jaya village development this was evidenced by the dominant Kubang Jaya village community when invited to hold a village consultation meeting or other sub-district event.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas Negara merupakan sosial (masyarakat) yang di atur secara konstitusional (berdasarkan Undang-Undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Negara Indonesia terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil, lebih dari 17.000 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, sehingga tidak memungkinkan segala sesuatu diatur oleh pemerintah pusat. Untuk itu perlu adanya pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan – kewenangan tertentu oleh Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah masing-masing.

Keberadaan pemerintah daerah mendapat landasan yuridis dengan dicantulkannya dalam Pasal 18 UUD 1945. Pada ayat (1) disebutkan “ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota yang tiap kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah tersendiri”. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota pada dasarnya mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Meskipun demikian daerah-daerah yang diberikan kewenangan-kewenangan otonomi tersebut bukan

merupakan Negara bagian (*state*) melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka Negara Kesatuan.

Dalam menyelenggarakan pemerintah berdasarkan pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah digunakan asas otonomi dan tugas pembantu.

Fungsi pemerintahan menurut undang-undang ini terbagi menjadi 3 bagian, pertama fungsi pemerintahan absolut, fungsi pemerintahan konkuren dan fungsi pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi fungsi yang menjadi domain pusat dan domain daerah. Asas yang digunakan pembagian fungsi pemerintahan terdiri dari asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Fungsi pemerintahan absolut adalah fungsi pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Fungsi pemerintahan konkuren adalah fungsi Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Pembagian itu mencakup berbagai bidang, mulai dari pertanian, perdagangan, pertambangan, perikanan dll. Tapi prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional.

Pembagian fungsi konkuren itu kemudian diperinci dalam tatananan territorial atau wilayah, seperti contohnya dalam lokasi, pusat berwenang pada

lokasi lintasi Negara ataupun lintas daerah provinsi, sedang provinsi berada pada lintas kota/ kabupaten, sedang untuk tingkat kota/ kabupaten berada pada area dalam kota/ kabupaten.

Berkaitan dengan kewenangan daerah yang kemudian dibuat dalam bentuk kebijakan daerah, urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah kemudian dibagi menjadi 2 bagian, pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib ini kemudian dibagi lagi dalam 2 bagian, pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan-urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial.

Salah satu bentuk dari pemerintahan tersebut adalah pemerintahan desa di mana desa atau nama lain yang dijamin di dalam pasal 18 B UUD 1945 yaitu kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan di paksa-paksakan ada bukan di hidup-hidupkan. Menurut Koesoemo(2004;280)., desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.

Untuk menindaklanjuti amanah pasal 18 B UUD 1945, maka pemerintah telah melahirkan regulasi pemerintahan desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa bahwa pada pasal 1 ayat 3 disebutkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa, Pelaksanaan Pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan untuk memperkuat dan mempertegas penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pengaturan desa berdasarkan :

- a. Subsidiaritas
- b. Keberagaman
- c. Kebersamaan
- d. Rekognisi

Kepala Desa adalah Pemerintah Desa atau yang di sebut dengan nama lain yang di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan hal ini di tuangkan dalam pasal 1 angka 4Permendagri nomor 84 tahun 2015 tentang SOTK bahwa Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2015 bahwa sebagai seorang Kepala Desa sekaligus pemimpin dalam pemerintahan Desa maka seorang Kepala Desa harus dibantu oleh Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain yang ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selain pelaksana kewilayahan, Kepala Desa juga dibantu oleh Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan.

Salah satu tugas Kepala Desa yang disebutkan yaitu Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Untuk mencapai tujuan pembangunan di perlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan, merealisasikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan sarana umum Desa.

Usman (2013;488) menyatakan koordinasi adalah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah. Menurut Jenssen (dalam Bratakusuma 2003;312) menyatakan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas ke arah tujuan pembangunan adalah salah satu tugas yang paling menantang dalam menanggapi pembangunan daerah. Lebih gampang mengucapkan dari pada mengerjakannya.

Dengan demikian ada beberapa alasan yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik dalam menilai perlunya koordinasi pembangunan, yaitu bahwa;

1. Koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penyelarasan dalam proses yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan bersama.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan Undang-undang yang membahas mengenai pemerintahan Desa, Kedudukan Desa, Pemerintah Desa dan sebagainya. Pada Pasal 22 disebutkan Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, **Pelaksanaan Pembangunan Desa**, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Masyarakat Desa berhak: a) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Oleh karena itu salah satu tugas dari Kepala Desa adalah mengkoordinasi pembangunan Desa.
4. Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, teknik pelaksanaan pembangunan desa yaitu Kepala Desa menyampaikan usulan pembangunan desanya dalam Musrenbang Kecamatan, kemudian apabila dalam Musrenbang kecamatan usul program pembangunan tersebut diterima maka akan dibahas dalam rapat desa atau Musrenbang Desa dengan aparat desa seperti Sekretaris desa, BPD dan Pendamping desa, Kepala desa mengkoordinasikan apakah program pembangunan tersebut memang dibutuhkan di masyarakat desa.

Indikator peranan Kepala Desa dalam pembangunan Desa disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu :

- a. Pada pasal 80, perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Ayat (2) yakni Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah penyusunan rencana Pembangunan Desa.

- b. Pada pasal 85, penetapan rencana pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana yaitu kepala desa berperan mengendalikan pelaksanaan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa.
- d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.

Salah satu daerah yang termasuk kedalam Desa adalah Desa Kubang Jaya yang berada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Siak Hulu terdiri dari 12 desa, dengan luas wilayah 689,80 Km² dan jumlah penduduk 94.108 dengan salah satunya ialah Desa Kubang Jaya. Secara geografis pusat Pemerintahan Desa Kubang Jaya lebih berdekatan dengan ibukota Provinsi Riau, yakni Pekanbaru dengan jarak 9 km. Jarak pusat Pemerintahan Desa Kubang Jaya dengan ibukota Kecamatan Siak Hulu adalah 18 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 60 menit.

Keadaan Desa Kubang Jaya berada pada iklim tropis seperti yang terjadi pada seluruh desa di Kabupaten Kampar. Desa Kubang Jaya mempunyai 4 dusun, yaitu Dusun Sialang Indah, Dusun Keramat Sakti, Dusun Bencah Pudu Permai, dan Dusun Kasang Kulim dengan luas wilayah secara keseluruhan adalah ±16.380 hektar.

Alasan Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Kubang karena Desa Kubang Jaya memiliki sumber daya yang memadai dan sedang berusaha membangun desa agar menjadi desa yang maju dan berkembang. Pembangunan Desa Kubang Jaya khususnya di segala bidang sangat di perlukan peranan Kepala Desa dalam menjalankan pembangunan sehingga masyarakat di Desa Kubang Jaya dapat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

Skala prioritas pembangunan desa Kubang Jaya lebih kepada pembangunan jalan, halini dikarena jalan akse menuju desa Kubang Jaya banyak yang berlubang dan berdebu. Adapun rincian skala prioritas pembangunan desa Kubang Jaya dapat dilihat pada Tabel I.1 berikut :

Tabel I.1 Skala Prioritas Pembangunan di Desa Kubang Jaya

No	Pembangunan	Biaya	Lokasi	Tahun	Keterangan
1.	Pembangunan jalan menuju Kubang Pratama Permai (KPP)	-Rp. 565.172.476	-Dusun III -Dusun IV	2016	Telah selesai
2.	Pembangunan aula desa Kubang Jaya	Rp. 110.934.000	Kantor Desa Kubang Jaya	2015	Telas Selesai
3.	Pembangunan semenisasi Dusun Ginting	Rp. 76.872.000	Dusun I	2016	Telah Selesai
5.	Pembangunan saluran irigasi	Rp. 196.305.000	Turap jalan sd 028	2016	Pembangunan ttelah selesai

Sumber : Kantor Desa Kubang Jaya, 2017

Pada Tabel I.1 terlihat bahwa ada lima program skala prioritas pembangunan pada Desa Kubang Jaya, seperti pembangunan jalan menuju Kubang Pratama Permai (KPP) yang merupakan program pembangunan tahun

2016. Pembangunan ini menjadi skala prioritas karena kondisi jalan yang memprihatinkan berlubang dan apabila musim hujan terjadi banjir sehingga rawan kecelakaan. Program pembangunan skala prioritas lainnya yaitu pembangunan aula desa, semenisasi dan pembangunan saluran irigasi.

Namun, masih ada beberapa pembangunan di Desa Kubang Jaya yang tersendat atau tidak terselesaikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut ini:

Tabel I.2 Pembangunan yang dilakukan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar periode 2015-2017

No	Pembangunan	Biaya	Lokasi	Tahun	Keterangan
1.	Pembangunan pos yandu	-Rp. 365.172.476 -Rp.34.986.000	-Dusun II RW.03 -Dusun II RW.04	2015	Posyandu telah berdiri, namun terdapat kekurangan dalam sarana dan prasarana
2.	Pembangunan RKB PDTA Al-Hidayah	Rp. 91.934.000	Dusun III	2015	Pembangunan tidak terselesaikan
3.	Pembangunan semenisasi S4 lingkungan	-Rp. 76.872.000 -Rp. 84.524.665	-Dusun IV -Dusun I	2015	Pembangunan tidak sampai selesai
4.	Pemasangan keramik dan rehap ringan aula desa	Rp. 41.869.812	Kantor desa	2015	Pembangunan telah selesai
5.	Pembangunan saluran irigasi	Rp. 196.305.000	Turap jalan sd 028	2016	Pembangunan telah selesai
6.	Pembangunan jalan desa	-Rp. 199.701.900 -Rp. 148.018.000 -Rp. 193.288.000 -Rp. 193.288.000	-Dusun I -Dusun I -Dusun III -Dusun IV	2016	Hingga saat ini belum terselesaikan
7.	Pembangunan drainase beton	-Rp. 86.112.000 -Rp. 86.122.000 -Rp. 86.112.000	- Dusun I - Dusun II - Dusun III	2017	Pembangunan hanya berjalan di Dusun I

8.	Pembangunan turap	Rp. 45.357.000	Dusun II	2017	Pembangunan Belum berjalan
----	-------------------	----------------	----------	------	----------------------------

Sumber : Kantor Desa Kubang Jaya, 2017.

Pada tabel I.2 terlihat bahwa sebagian besar perencanaan pembangunan tidak berjalan lancar dan tidak terealisasi padahal anggaran dana yang telah dibiayai oleh APBD cukup banyak. Adapun seperti pembangunan posyandu belum maksimal karena terdapat kekurangan pembangunannya seperti tidak ada saluran air dan ruangan yang sangat sempit sehingga masyarakat berdesak-desakan.

Berdasarkan hal di atas, sebagai fenomena yang terjadi dan berkaitan dengan Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

1. Berdasarkan Pembangunan yang dilakukan kepala desa Kubang Jaya belum maksimal. Hal ini dapat dilihat pada Tabel I.2, banyak perencanaan pembangunan yang belum berjalan dan selesai hingga tahun ini.
2. Berdasarkan observasi pra-riset dan wawancara dengan salah seorang warga di desa Kubang Jaya, dapat disimpulkan bahwa banyak sarana dan prasarana umum yang belum maksimal dalam pembangunannya, seperti pembangunan jalan masih banyak yang belum terselesaikan, sehingga ada jalan yang masih berlubang sehingga apabila musim hujan jalan tersebut rawan kecelakaan.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut di atas maka penulis membatasi fokus penelitian ini pada pembangunan fasilitas umum di Desa Kubang Jaya. Sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat

judul “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam pelaksanaan peranan kepala desa dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Siak Hulu.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan peranan kepala desa dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat memperkaya wawasan konsep praktek penulis khususnya mengenai Peranan Kepala Desa

Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

b. Secara Praktis

Menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pemerintahan khususnya mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

c. Secara Kontribusi

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang di ajukan dalam penelitian ini, “peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa kubang jaya kecamatan siak hulu kabupaten kampar”. Berikut ini dikemukakan Teori dan Konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintahan, yang paling sedikit “pemerintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, ke dua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan, perbedaan pemerintah dalam arti luas dengan pemerintah dalam arti sempit, pemerintah dalam arti sempit meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (disebut eksekutif), sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan (di sebut legislatif) dan melaksanakan peradilan (disebut yudikatif), (dalam Syaffie, 2009;20).

Menurut Ndraha (2011;3) ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap

orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Widodo (2001;2) pemerintahan lokal merupakan pemerintah di dekatkan pada rakyat. Dengan demikian akan dapat di kenali apa yang akan menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan secara aspirasi rakyat secara baik dan benar, karena kebijakan yang akan dibuat akan mencerminkan apa yang akan menjadi kepentingan aspirasi rakyat yang dilayani.

Sedangkan pemerintahan adalah kekuasaan memmetintah suatu Negara (dalam negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan).

Ndraha (2010;6) mengatakan pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat, baik individu-individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat dalam sebuah masyarakat. Di sana seseorang atau sudut kelompok dalam proses atau interaksi sosial terlihat terhadap orang atau kelompok lain.

Selanjutnya di dalam Munaf (2015; 202) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan konsep tata pemerintahan yang baik (good governance) itu terdapatnya citra pemerintahan yang demokratis. Prinsip demokrasi yang paling penting adalah meletakkan kekuasaan di tangan rakyat dimana pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai

Kebijaksanaan Pemerintah dan Negara, oleh karena kebijakan itu menentukan kehidupan rakyat.

Menurut Iver (dalam Syaffie, 2011;14) pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintah. Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

Menurut Mahfud (2001; 66) pemerintahan dalam arti luas di defenisikan sebagai seluruh organ kekuasaan di dalam Negara, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Bahkan dalam arti luas pemerintahan diartikan sebagai pelaksana tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan Negara. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat sampai kedaerah.

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditugaskan bahwa:

- a. Negara Republik Indonesia adalah bagian atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- b. Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah (Syafiie, 2003; 110):

1. Azas Desentralisasi

Azas Desentralisasi adalah asas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Azas Dekonsentrasi

Azas Dekonsentrasi adalah asas pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada wilayah, atau instansi vertikal tingkat atasnya, kepada pejabat-pejabat di daerah.

3. Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan adalah asas untuk turut sertanya pemerintahan daerah berugas dalam melaksanakan urusan pemerintahan pusat yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah oleh pemerintahan pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajibannya mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Di indonesia tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, maka penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah, dilaksanakan oleh perangkat pemerintah pusat yang ada di daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi (Syafiie, 2003; 88).

2. Konsep Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003; 75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi yaitu :

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, merupakan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga di lakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot.
- c. Fungsi pelayanan, merupakan fungsi utama pemerintah dan cukup beragam, dengan adanya fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya.

Selain itu menurut Ndraha (dalam Labobo, 2006; 25) pemerintah memiliki dua fungsi dasar yaitu :

1. Fungsi Primer (pelayanan)

Fungsi primer adalah fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat di privatisasikan termasuk juga hamkam, layanan civil dan layanan birokrasi.

2. Fungsi Sekunder (pemberdayaan)

Fungsi sekunder adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tidak berdaya (*powerless*) termasuk penyediaan dan pembangunan secara prasarana.

Selanjutnya Rasyid (dalam Labobo, 2006; 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsi pemerintahan adalah :

1. Fungsi Pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negara dan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi Pembangunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan tercipta. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan. Namun di dalam menjalankan tiga fungsi diatas pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut dengan kebijakan pemerintah.

3. Konsep Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ndraha (2015;23) Pemerintah daerah adalah semua peralatan di daerah/provinsi/kabupaten/kecamatan/kelurahan dan dibawahnya yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan dan menurut Bastian (2002;203) menyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepada daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

b. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah seperti yang tercantum dalam bab 1 pasal 1 sebagai berikut yaitu pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Syafiie,2013;32)

Dari pengertian di atas secara umum pemerintah daerah dapat di artikan sebagai perangkat daerah yang di tujukkan untuk dapat menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan daerah. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

4. Konsep Pemerintahan Desa

a. Pemerintahan Desa

Menurut Awang (2010; 49) pemerintah secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, mempertahankan, dan melindungi berbagai kehidupan mereka.

Menurut Widjaja (2002; 65) menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Menurut Nurcholis (2001; 2) desa adalah suatu wilayah yang ditanggapi oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup gotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatnya. Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, Desa merupakan kesatuan hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh Negara.

Dalam pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa. Selanjutnya Nurcholis (2001; 73) menjelaskan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD. Pemerintah desa adalah organisasi pemerintah yang terdiri atas : (1) unsur pimpinan kepala desa, (2) unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas : sekretariat desa, unsur pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan. Dari ketiga unsur tersebut memiliki unsur masing-masing.

Kepala desa di pilih langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai kepala desa. Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat istiadat setempat yang ditetapkan dalam peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

b. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, anggota BPD terdiri daerah ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh dan pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan BPD selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Sebagai tempat demokrasi desa, anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang telah

memenuhi persyaratan. Sedangkan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD sendiri.

5. Konsep Peranan

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai

sebagai tugas atau pemberian tugas kepadaseseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki aspek - aspek sebagai berikut:

- 1) Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi a tau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian per aturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individudalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagistruktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yangdidasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupanmasyarakat.
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukanoleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuaidengan kedudukanya didalam suatu sistem.
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yangdidasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosialyang terjadi secara nyata

Peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan birokrasi pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh

karena itu untuk menghindari terjadinya fungsi birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak rasional, tidak diperlengkapi oleh pegawai yang betul-betul profesional. Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terdapat kesatuan tindakan, kesatuan arah, penyesuaian dan kesenambungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat dicapai. (Kaho;2002;220)

Menurut Ndraha (2003;53) Peranan diartikan suatu sebagai perilaku yang diharapkan dari atau lebih ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut pengertian peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan tak dapat di pisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lainnya dan sebaliknya.

6. Konsep Pembangunan

Menurut Siagian (2012;4) pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu negara bangsa menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa. Selanjutnya Siagian (2012;142) menyebutkan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan adalah :

- a. Sebagai Stabilitor.
- b. Sebagai Inovator.
- c. Sebagai Pelopor.

Pembangunan adalah suatu upaya perubahan yang berlandaskan pada suatu pilihan pandangan tertentu yang tidak bebas dari pengalaman (sejarah),

realitas keadaan yang sedang di hadapi, serta kepentingan pihak-pihak yang membuat keputusan pembangunan. Pembangunan memiliki makna yang ganda. Yang pertama adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang di fokuskan pada masalah kuantitatif dari produksi dan penggunaan sumber daya. Yang kedua adalah pembangunan yang lebih berorientasi pada perubahan dan pendistribusian barang-barang dan peningkatan hubungan sosial. Makna yang kedua lebih berorientasi pada pembangunan sosial yang terfokus pada pendistribusian perubahan dalam struktur dari masyarakat yang di ukur dari berkurangnya diskriminasi dan eksploitasi serta meningkatnya kesempatan yang sama dan distribusi yang seimbang dari keuntungan pembangunan pada keseluruhan komponen masyarakat (Hadi, 2000;90).

Terkait dengan hal itu konsep pembangunan berkelanjutan yang di dukung dengan pendekatan kemanusiaan merupakan suatu konsep yang telah di lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena secara kodrati masyarakat mempunyai kecenderungan untuk merubah hidup dan kehidupan sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu pendekatan masyarakat di titik beratkan pada lingkungan sosial ekonomi yang bercirikan :

- a. Pembangunan yang berdimensi pelayanan sosial dan di arahkan pada kelompok sasaran melalui pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Pembangunan yang ditujukan pada pembangunan sosial seperti terwujudnya pemerataan pendapatan dan mewujudkan keadilan.
- c. Pembangunan yang di orientasikan kepada masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 menyebutkan bahwa Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perencanaan pembangunan desentralistik adalah pemerintah daerah mempunyai peranan yang cukup penting. Pemerintah daerah dibagikan alokasi dana dalam bentuk “*Block Grand*” yang penggunaannya ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah melalui badan perencanaannya masing-masing. Keuntungannya adalah masyarakat lokal diberikan kewenangan yang cukup untuk dapat menentukan arah pembangunan daerahnya sendiri sesuai potensi dan permasalahan pokok yang dihadapi oleh daerah bersangkutan. Tahapan perencanaan pembangunan menggambarkan tugas pokok perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Tahapan Penyusunan Rencana

Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana. Penyusunan rencana dapat dilakukan secara swakelola oleh badan perencana sendiri atau dikontrakkkan kepada perusahaan konsultan yang relevan bila tenaga perencana yang terdapat pada badan perencana tidak mencukupi.

2. Tahapan Penetapan Rencana

Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan berlaku.

3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu.

4. Tahap Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, badan perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

7. Konsep Otonomi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008;992) otonomi daerah adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah di amandemen dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah, definisi otonomi daerah yaitu otonomi daerah adalahnaek

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007;30). Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah juga mendefenisikan daerah otonom sebagai berikut daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kabupaten dan kota berdasarkan asas desentralisasi. Dengan di gunakannya asas desentralisasi pada kabupaten dan kota, maka kedua daerah tersebut menjadi daerah otonom penuh (Hanif Nircolis, 2007;29). Dari pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi daerah dapat di artikan sebagai wewenang yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada daerah baik kabupaten maupun kota untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku dan meningkatnya.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu tentang peranan Kepala Desa dalam pembangunan desa telah dilakukan, diantaranya yaitu:

Tabel II.1: Tabel Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu.

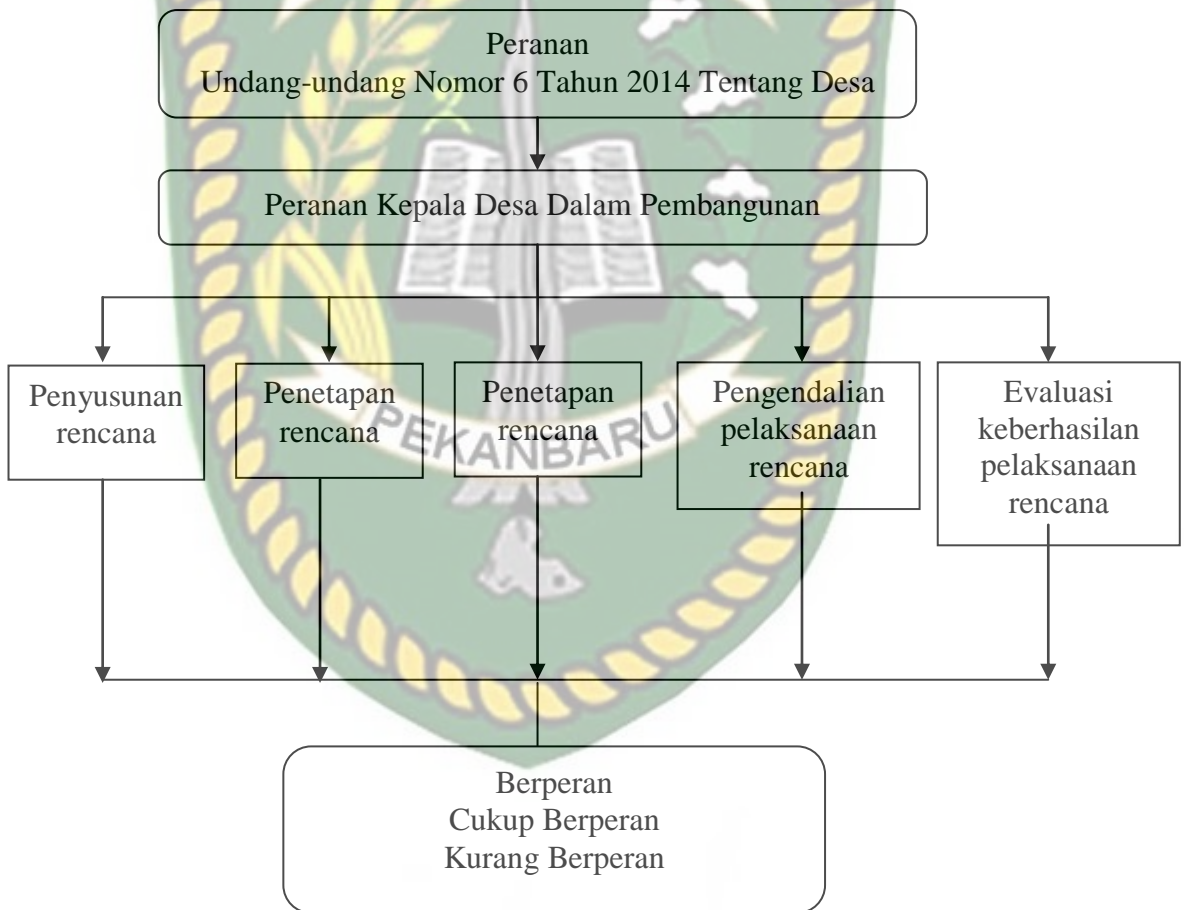
No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sarpin	Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Genjor Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro	Sama-sama meneliti tentang Peranan kepala Desa	Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, objek penelitian, indikator dan pembahasan masalah.
2	Vindy Gunawan	Peran Kepala Desa dalam pembangunan jalan desa di Desa Sawangan Kecamatan air Madidi Kabupaten Minahasa	Sama-sama meneliti tentang Peranan kepala Desa	Perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian, fokus penelitian penulis bukan pada pembangunan jalan melainkan fasilitas umum desa, perbedaan lainnya yaitu pada indikator dan pembahasan masalah.
3	Septiana Nur Utami	Peran Kepala Desa dalam Motivator Pembangunan Desa	Sama-sama meneliti tentang Peranan kepala Desa	Perbedaan terletak pada objek penelitian, fokus penelitian penulis bukan sebagai motivator pembangunan melainkan pada pelaksana pembangunan , perbedaan lainnya yaitu pada

				indikator dan pembahasan masalah.
4	Dendi Haryadi	Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Pesisir Kecamatan Mantang Kabupaten Mintan	Sama-sama meneliti tentang Peranan kepala Desa	Perbedaan terletak pada objek penelitian, fokus penelitian penulis dalam pelaksana pembangunan sedangkan fokus penelitian Dedi Haryadi kepada perencanaan.
5	Artika Yasinda	Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa	Sama-sama meneliti tentang Peranan kepala Desa	perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus penelitian penulis dalam pelaksana pembangunan sedangkan fokus penelitian Artika Yasinda kepada partisipasi masyarakatnya. perbedaan lainnya yaitu pada indikator dan pembahasan masalah.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran untuk menjelaskan variabel penelitian dan indikator-indikator maupun aspek-aspek dalam peranan kepala desa dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.



Sumber: Modifikasi Penelitian, 2018.

D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang di analisis dalam penelitian ini, maka di kemukakan konsep operasional sebagai berikut :

- a. Kepala desa adalah seorang masyarakat desa setempat yang dipilih berdasarkan penjurangan oleh panitia teknis yang di tetapkan melalui pemilihan.
- b. Pembangunan adalah suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana menuju lokasi yang lebih baik di lakukan secara sadar oleh pemerintah dan masyarakat agar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dapat tercapai di semua bidang.
- c. Penyusunan rencana adalah menyusun naskah atau rancangan rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab badan perencana.
- d. Penetapan Rencana Rancangan adalah rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai ketentuan berlaku.
- e. Pengendalian pelaksanaan rencana adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu.
- f. Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

E. Operasional Variabel

Variabel yang akan di teliti dalam penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut :

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
Peranan adalah harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbingan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat di katakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat.	Peranan kepala desa dalam pembangunan desa	Penyusunan Rencana	a. Kepala desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan	Berperan
			b. Kepala desa melibatkan aparat desa dalam penyusunan rencana pembangunan	Cukup Berperan
			c. Kepala desa melibatkan BPD dalam penyusunan rencana pembangunan	Kurang Berperan
	Penetapan Rencana	a. Penetapan rencana desa dilakukan dengan musyawarah	Berperan	
		b. Penetapan rencana desa disesuaikan dengan aspirasi masyarakat	Cukup Berperan	
		c. Penetapan rencana desa disesuaikan dengan dana APBDes	Kurang Berperan	
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana	a. Apabila pelaksanaan pembangunan dilakukan kepala desa dapat mengurangi masalah	Berperan	
		b. Kepala desa	Cukup Berperan	
			Kurang Berperan	

		<p>Evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana</p>	<p>membangunan sarana yang belum ada c. Kepala desa melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan</p> <p>a. Kepala Desa harus evaluasi terlebih dahulu b. Kepala desa melakukan perawatan sarana dan prasarana yang ada c. Kepala desa mencari solusi dalam pelaksanaan rencana pembangunan</p>	
--	--	--	--	--

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka akan di tetapkan melalui klafikasi penilaian yaitu klasifikasi berperan diberi nilai dengan persentase 65-100%, cukup berperan diberi nilai dengan persentase 34-64% dan kurang berperan diberi niali dengan persentase 1-33%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Berperan : Bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 66-100%.

Cukup Berperan : Bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 34-65%.

Kurang Berperan : Bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 1-33%.

Untuk pengukuran indikator-indikator ditetapkan dengan nilai sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana, dapat dikatakan :

Berperan : Bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 66-100%.

Cukup Berperan : Bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 34-65%.

Kurang Berperan : Bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 1-33%.

2. Penetapan Rencana, dapat dikatakan :

Berperan : Bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 66-100%.

Cukup Berperan : Bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukurang 34-65%.

Kurang Berperan : Bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 1-33%.

3. Pengendalian pelaksanaan rencana, dapat dikatakan :

Berperan : Bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 66-100%.

Cukup Berperan : Bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 34-65%.

Kurang Berperan : Bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 1-33%.

4. Evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana, dapat dikatakan :

Berperan : Bila semua indikator variabel telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau dengan ukuran 66-100%.

Cukup Berperan : Bila sebagian besar dari indikator variabel telah dilaksanakan atau dengan ukuran 34-65%.

Kurang Berperan : Bila sebagian besar indikator belum terlaksana atau dengan ukuran dibawah 1-33%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan maka tipe penelitian adalah *Survey Deskriptif* dengan menggunakan *Metode Kuantitatif*. Penelitian kuantitatif di katakan sebagai metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Hal ini sesuai menurut Singarimbun (2005;3) bahwa penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.

Sedangkan metode Deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian suatu kelompok, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara hubungan antara fenomena-fenomena yang di hadapi.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang terjadi bahwasanya peran kepala desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Kubang Jaya belum terlaksana dengan baik dan jauh dari harapan masyarakat selama ini seperti yang tertera pada latar belakang masalah.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atasobyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristikertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudianditarik kesimpulan (Sugiyono, 1999;73).

Pada penelitian ini populasi penelitian adalah Kepala Desa, perangkat desa dalam Melaksanakan Urusan Pembangunan di Desa sedangkan masyarakat menjadi pedoman.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yangdimiliki oleh populasi tersebut. bila populasi besar, dan penelititidak mungkin mempelajari semuanya maka peneliti dapatmengggunakan sebagian sampel yang diambil dari populasi(Sugiyono,1999:73). Untuk lebih jelasnya penemuan sampel yang di ambil dari setiap populasi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III.1 jumlah populasi dan sampel penelitian peranan kepala desa di desa kubang jaya kecamatan siak hulu kabupaten kampar.

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Sekretaris Desa	1	1	100%
2.	Kaur Pembangunan	1	1	100%
3.	Masyarakat (KK)	200	50	7,5%
	Jumlah	282	55	-

Sumber data : Data hasil olahan 2018.

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Penarikan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Untuk Kepala Desa, Kaur Pembangunan, Sekretaris Desa, Kepala Dusun karena populasinya relatif sedikit maka penarikan sampel menggunakan Metode *Sensus* yaitu penulis memungkinkan menggunakan secara keseluruhan dari populasi yang ada untuk dijadikan sebagai responden.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang didapatkan dengan tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yaitu hasil kuisioner dan wawancara menyangkut pelaksanaan peraturan daerah yang dilihat dari indikator pengorganisasian, interpretasi dan penerapan.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, arsip-arsip, struktur organisasi pegawai serta Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut dengan Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang di gunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang di butuhkan. Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan cara-cara sebagai berikut :

1. Observasi

Menurut Narimawati (2007;63), observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala/peristiwa yang diselidiki pada obyek penelitian.

2. Kuesioner

Kuisisioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebar daftar pertanyaan untuk diisi oleh sejumlah responden (Narimawati, 2007;64). Pengumpulan data untuk penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan kuisisioner. Kuisisioner diisi oleh responden penelitian.

3. Wawancara

Menurut Narimawati (2007;64), Wawancara adalah pengumpulan data melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pewawancara (pengumpul data) dengan narasumber (sumber data).

4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2009;82), Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan mengumpulkan data, yang diidentifikasi dari dokumentasi adalah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis. Dokumentasi

merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu cara penganalisaan yang dilakukan dengan menggambarkan data yang ada dari berbagai sumber dan menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial serta menelusuri segala fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas berdasarkan variabel dan indikator penelitian, tanggapan masyarakat dan berdasarkan penilaian penelitian.

Setelah data dan segala bahan yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya di pilihkan dan di kelompokkan menurut jenisnya yaitu data kualitatif akan di jelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas sedangkan data kuantitatif kan ditabulasi yang di sajikan dalam bentuk tabel lalu dilakukan analisa data dan di hubungkan landasan teori dan konsep serta ketentuan atau Perundang-Undangan yang berlaku sehubung dengan permasalahan penelitian, untuk kemudian peneliti dapat mengambil kesimpulan.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Adapun jadwal waktu kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Keterangan	Bulan dan Minggu Tahun 2018															
		September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP	X	X														
2.	Seminar UP			X	X												
3.	Revisi UP				X												
4.	Revisi Kuisisioner					X	X										
5.	Rekomendasi Survei							X	X								
6.	Survei Lapangan									X	X						
7.	Analisis Data											X	X				
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)													X	X		
9.	Konsultasi Revisi Skripsi														X	X	
10.	Ujian Konferehensif Skripsi															X	
11.	Revisi Skripsi															X	
12.	Penggandaan Skripsi																X

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2018.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Wilayah

Kecamatan Siak Hulu yang terdiri dari 12 (Dua Belas) Desa, dimana 6 (Enam) Desa terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kampar. Dengan kepala keluarga 23.281 dan jumlah jiwa 74.853 orang. Ditinjau dari letak Kecamatan Siak Hulu sangat strategis, karena dilewati oleh jalan antar Provinsi yaitu Jalan Lintas Timur. Jarak tempuh sebagai pusat pemerintahan sebagai berikut:

- a. Jarak ibukota kecamatan ke ibukota provinsi Riau 37 Km.
- b. Jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten Kampar 82 Km.2

Batas-batas wilayah Kecamatan Siak Hulu sebagai berikut:

- a. Disebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru
- b. Disebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Perhentian Raja
- c. Disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.

Tabel 4.1 Luas Lahan di Kelurahan Siak Hulu

No	Desa	Luas Lahan (Ha)							Total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Pangkalan Baru	-	174	-	444	305	-	10	933
2.	Buluh Cina	-	99	-	166	285	-	26	576
3.	Desa Baru	-	125	-	75	1275	-	-	1475
4.	Tanah Merah	-	23	-	20	1345	-	-	1388
5.	Pandau Jaya	-	15	-	25	1315	-	-	1355
6.	Kubang Jaya	-	150	-	15	925	-	-	1090

7.	Teratak Buluh	-	110	-	140	1205	-	25	1480
8.	Lubuk Siam	-	115	-	160	750	-	35	1060
9.	Tanjung Balam	-	79,5	-	152	267,3	-	25	523,8
10.	Kepau Jaya	-	129,5	-	143,5	247	-	-	520
11.	Buluh Nipis	-	50	-	285	138	-	10	483
12.	Pangkalan Serik	-	125	-	132	147	-	22	426
	Total	-	1.195	-	1.757,5	8.204,3	-	153	11.309,8

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu, 2018.

B. Kondisi Umum Sumber Daya Manusia (Penduduk)

Penduduk Merupakan komponen yang berada dalam suatu wilayah daerah tertentu dan juga faktor yang dominan dalam suatu pembangunan suatu wilayah, termasuk sumber daya manusia maka pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Jumlah penduduk di Kecamatan Siak Hulu Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Siak Hulu tahun 2017

No	Desa	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Pangkalan Baru	2079	1927	4006
2.	Desa Baru	3271	3163	6434

3.	Buluh Cina	705	660	1365
4.	Tanah Merah	9397	8937	18334
5.	Teratak Buluh	2252	2081	4333
6.	Lubuk Siam	899	864	1763
7.	Pandau Jaya	11896	10994	22890
8.	Buluh Nipis	887	845	1732
9.	Pangkalan Serik	684	598	1282
10.	Kepau Jaya	1261	1282	2543
11.	Tanjung Balam	606	545	1151
12.	Kubang Jaya	9283	9138	18421
	Total	43.220	41.034	84.254

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Siak Hulu berjumlah 43.220 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 41.034. Jumlah penduduk di Kecamatan Siak Hulu Tahun 2017 berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Desa	Jumlah Penduduk dan Umur Penduduk							KK
		0-9	10-19	20-29	30-39	40-49	50-59	>60	
1.	Pangkalan Baru	679	660	641	628	591	300	507	1117
2.	Desa Baru	1471	1268	1456	1.165	648	325	347	1505
3.	Buluh Cina	228	252	320	255	279	18	13	407
4.	Tanah Merah	2298	1603	3647	4147	1021	1281	465	4364
5.	Teratak Buluh	847	1160	949	641	477	189	70	1436
6.	Lubuk Siam	258	431	398	204	236	149	89	468

7.	Pandau Jaya	8274	5790	4328	1276	1509	2202	476	5722
8.	Buluh Nipis	296	280	399	315	262	60	45	480
9.	Pangkal Serik	183	223	192	234	188	192	70	351
10.	Kepau Jaya	397	478	404	396	402	346	120	507
11.	Tanjung Balam	173	226	311	201	128	87	25	294
12.	Kubang jaya	1527	3633	4154	4021	3.355	14677	264	4.651
Total		16.631	16.004	17.199	13.483	9.096	19.826	2.491	21.302

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk di Kecamatan Siak Hulu yang berumur 0-9 tahun berjumlah 16.631 orang, jumlah penduduk yang berumur 10-19 tahun berjumlah 16.004 orang, jumlah penduduk yang berumur 20-29 tahun berjumlah 17.199 orang, jumlah penduduk yang berumur 30-39 tahun berjumlah 13.483 orang, jumlah penduduk yang berumur 40-49 tahun berjumlah 9.096 orang, jumlah penduduk yang berumur 50-59 tahun berjumlah 19.826 orang, dan jumlah penduduk yang berumur diatas 60 tahun berjumlah 2.491 orang.

Jumlah penduduk di Kecamatan Siak Hulu Tahun 2013 berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Desa	Jumlah Penduduk						Total
		Belum/ Tidak	SD	SLTP	SLTA	Akademi	Perguru an Tinggi	
1.	Pangkalan Baru	812	996	872	901	71	354	4.006
2.	Buluh Cina	614	192	388	97	47	27	1.365
3.	Desa Baru	4.998	689	382	231	87	47	6.434
4.	Tanah Merah	1750	2.353	2.833	3.516	951	519	1.1922

5.	Pandau Jaya	1234	3.353	3.233	14.016	951	1.219	2.4006
6.	Kubang Jaya	1921	5.271	6.021	5.008	125	75	1.8421
7.	Teratak Bulu	900	1.171	1.121	1.108	50	20	4.370
8.	Lubuk Siam	900	440	202	188	21	14	1.765
9.	Tanjung Balam	688	158	200	78	9	18	1.151
10.	Kapau Jaya	436	1.198	671	195	14	34	2.548
11.	Buluh Nipis	260	1.111	1.238	40	47	51	2.747
12.	Pangkalan Serik	251	389	411	188	31	12	1.282
Total		14.764	17.321	17.572	25.566	2.404	2.390	80.017

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk di Kecamatan Siak Hulu yang belum atau tidak sekolah berjumlah 14.764 orang, penduduk yang berpendidikan SD berjumlah 17.321 orang, penduduk yang berpendidikan SLTP berjumlah 17.572 orang, penduduk yang berpendidikan SLTA berjumlah 25.566 orang, penduduk yang berpendidikan di Akademi berjumlah 2.404 orang, dan penduduk yang berpendidikan di Perguruan tinggi berjumlah 2.390 orang.

Jumlah penduduk di Kecamatan Siak Hulu Tahun 2013 berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

No	Desa						Total
		Petani	Pekebun	Peternak	Nelayan	Lain-lain	
1.	Pangkalan Baru	227	130	73	50	618	1.098
2.	Buluh Cina	215	265	43	225	137	875
3.	Desa Baru	125	95	88	-	1.152	1.460
4.	Tanah Merah	565	125	320	-	1.865	2.875
5.	Pandau Jaya	725	716	125	-	31.534	33.100
6.	Kubang Jaya	150	30	20	20	18.021	18.241
7.	Teratak Bulu	257	85	80	83	3.865	4.370
8.	Lubuk Siam	156	133	91	390	251	1.021

9.	Tanjung Balam	81	115	15	138	249	598
10.	Kapau Jaya	76	400	175	46	148	845
11.	Buluh Nipis	504	206	95	12	91	908
12.	Pangkalan Serik	98	216	25	316	412	1.067
Total		3.179	2.506	1.550	1.280	58.343	66.458

Sumber : Kantor Kecamatan Siak Hulu, 2018.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk di Kecamatan Siak Hulu yang bekerja sebagai petani berjumlah 3.179 orang, penduduk yang bekerja sebagai pekebun berjumlah 2.506 orang, penduduk yang bekerja sebagai peternak berjumlah 1.150 orang, penduduk yang bekerja sebagai nelayan berjumlah 1.280 orang, dan jumlah penduduk yang bermata pencaharian lainnya sebanyak 58.343 orang.

C. Gambaran Umum Desa Kubang Jaya

Geografis Desa Kubang Jaya berada dalam wilayah kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, desa ini memiliki luas wilayah 15000 km². dengan batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Desa Teratak Buluh Kec. SiakHulu
2. Sebelah Selatan : Desa Kampong Pinang Ke. Perhentian Raja
3. Sebelah Timur : Desa Lubuk Siam Kec.SiakHulu
4. Sebelah Barat : Desa Teluk Kenidai Kec.Tambang

Desa Kubang Jaya memiliki ketinggian tanah dari permukaan laut 38 meter, jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 17 Km, jarak dari ibu kota Kabupaten 60 Km, dan jarak dari ibu kota provinsi yaitu 12 Km.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Tahap awal dari uraian pembahasan Bab V ini, penulis atau peneliti merasa perlu untuk menjelaskan identitas dari para responden. Oleh karena itu hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitas dan validitas berbagai informasi penelitian yang diberikan oleh para responden, adapun identitas responden yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Umur Responden

Umur merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas – tugas yang diberikan, selain itu umur juga dapat berpengaruh pada produktivitas kinerja seseorang. Semakin lanjut umur atau usia seseorang maka akan mempengaruhi produktivitas kerja, Tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan kelemahan fisik dalam bekerja, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor kesehatan, daya tahan tubuh yang berkurang dan lain-lain. Adapun tingkat umur responden yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel V.1 berikut:

Tabel V. 1 Jumlah Keseluruhan Responden berdasarkan Umur

No	Umur Responden	Jumlah	Presentase
1	20-30 tahun	18 orang	36 %
2	30 – 40 tahun	12 orang	24 %
3	>40 tahun	20 orang	40 %
Jumlah		50 orang	100%

Sumber : Data Olahan, 2018.

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui bahwa mayoritas umur responden yang menjadi responden dalam penelitian ini berada pada umur 23-40 tahun yakni sebanyak 18 orang atau 36 % dan responden dengan umur 30-40 tahun berjumlah 12 orang atau dengan persentase 24 % dan begitu juga untuk jumlah responden dengan kategori umur >40 tahun yakni 20 orang atau dengan persentase 40 %. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas responden berada pada tingkat umur > 40 tahun.

2. Jenis Kelamin Responden

Identitas responden selanjutnya yakni jenis kelamin, berikut ini diuraikan jenis kelamin responden yang menjadi responden untuk penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.2 berikut :

Tabel V. 2 Jumlah Keseluruhan Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Perempuan	18 orang	36 %
2	Laki-laki	32 orang	64 %
	Jumlah	72 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018.

Berdasarkan tabel V.2 dapat diketahui bahwa responden laki-laki dan perempuan memiliki jumlah yang berbeda signifikan yakni untuk responden dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 18 orang atau 36 % sedangkan responden dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah 32 orang atau dengan persentase 64 %.

3. Tingkat Pendidikan Responden

Dalam sebuah penelitian, jawaban yang diberikan oleh responden dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini

dikarenakan jawaban setiap responden tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memanglah tidaklah sama persis antara yang satu dengan satu lainnya., dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah penelitian tersebut. Pemahaman seseorang responden terhadap masalah penelitian tidak kaan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia tempuh.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik daripada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan responden cukup variatif mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Strata – I. Adapun tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.3 berikut:

Tabel V. 3 Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SMP	9 orang	18 %
2	SMA	22 orang	44 %
3	Strata I	19 orang	38 %
	Jumlah	72 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018.

Berdasarkan tabel V.3 dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan terakhir tamatan SMA dengan jumlah 22 orang atau 44 % kemudian untuk tingkat strata I sejumlah 19 orang atau dengan persentase 38 % dan yang paling sedikit yakni tamatan SMP sejumlah 9 orang responden atau 18 %.

B. Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Salah satu tugas Kepala Desa yang disebutkannya itu Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Untuk mencapai tujuan pembangunan di perlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan, merealisasikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan sarana umum Desa.

Usman (2013;488) menyatakan koordinasi adalah proses mengintegrasikan (memadukan), menyinkronisasikan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas yang terpisah. Menurut Jensen (dalam Bratakusuma 2003;312) menyatakan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas ke arah tujuan pembangunan adalah salah satu tugas yang paling menantang dalam menangani pembangunan daerah. Lebih gampang mengucapkan dari pada mengerjakannya. Dengan demikian ada beberapa alasan yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik dalam menilai perlunya koordinasi pembangunan, yaitu bahwa;

1. Koordinasi dalam pembangunan sangat diperlukan suatu konsekuensi logis adanya aktivitas dan kepentingan yang berbeda.
2. Aktivitas dan kepentingan yang berbeda juga membawa konsekuensi logis terhadap adanya tanggung jawab yang secara fungsional berbeda pula.
3. Ada institusi, badan, lembaga yang menjalankan peran fungsinya masing-masing
4. Ada unsur sentralisasi dan desentralisasi yang dijalankan dalam proses

pembangunan yang melibatkan institusi pusat maupun daerah.

5. Koordinasi merupakan alat sekaligus upaya untuk melakukan penyelarasan dalam proses yang harmonis, sinergis, dan serasi untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu penulis menetapkan beberapa indikator yang akan menjadi tolak ukur penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana

Dalam melakukan pembangunan di Desa Kubang Jaya, Kepala Desa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam kegiatan pembangunan seperti perangkat desa, BPD dan masyarakat sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan. Dalam hal ini, Kepala Desa yang bertindak sebagai koordinator , harus dapat menyelesaikan berbagai masalah selama aktivitas yang dijalankan untuk program pembangunan. Dengan demikian semua tugas dapat diselaraskan (koordinasi), sehingga terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Dalam melaksanakan pembangunan yang menjadi pokok pemerintahan desa tentu saja tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diinginkan, tanpa adanya kerjasama atau koordinasi antar aparat dan pembangunan itu tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya partisipasi dan dukungan seluruh aparatur desa.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan responden penelitian tentang indikator penyusunan rencana peranan kepala desa dalam pembangunan di Desa Kubang Jaya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.4 Sebaran Tanggapan Responden Terhadap indikator Penyusunan Rencana Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kabupaten Kampar.

No	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	2	3	4	5	6
1	Kepala desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana pembangunan	20	18	12	50
2	Kepala desa aparat desa melibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan	15	18	17	50
3	Kepala desa BPD melibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan	32	6	12	50
Jumlah		67	42	41	150
Rata-Rata		22	14	14	50
Persentase (%)		45 %	28 %	27 %	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018.

Dari tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan jumlah responden yaitu 50 orang. Untuk pertanyaan pertama memberikan tanggapan berperan sebanyak 20 orang, cukup berperan sebanyak 18 orang dan kurang berperan sebanyak 12 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua responden memberikan tanggapan berperan sebanyak 15 orang, cukup berperan 18 orang dan kurang berperan sebanyak 17 orang. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga responden memberikan tanggapan berperan sebanyak 32 orang, cukup berperan 6 orang dan kurang berperan sebanyak 12 orang. Jadi total jawaban responden yang memberikan tanggapan berperan terhadap indikator penyusun rencana sebanyak 67 dengan rata-rata 22 dengan persentase 45%. Sementara itu untuk tanggapan cukup berperan terhadap indikator penyusun rencana sebanyak 42 dengan rata-rata 14

dan persentase 28%. untuk tanggapan kurang berperan terhadap indikator penyusun rencana sebanyak 41 dengan rata-rata 14 dan persentase 27%.

Berdasarkan hasil analisis kuisisioner yang dijawab oleh responden, dapat ditarik kesimpulan bahwa para responden menilai Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa di Kubang Jaya berkategori “cukup berperan” dalam penyusunan rencana. Dari tiga pertanyaan yang diajukan pada sub indikator pertama yang telah ditanggapi oleh responden, menunjukkan bahwa kepala desa sejauh ini telah berperan aktif dalam kegiatan penyusunan rencana pada setiap tahunnya, sebagian besar responden merupakan anggota masyarakat yang sering terlibat dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang telah diadakan setiap tahunnya. Peran kepala desa juga dinilai baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 November 2018 pukul 10.00 WIB dengan Sekretaris Desa Kubang Jaya. Yakni Bapak Hengky Efriadi, SE mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Siak Hulu, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : Menurut Bapak/Ibu apa sajakah pembangunan fasilitas umum yang sudah dibangun di Desa Kubang Jaya? Beliau mengatakan bahwa

“Pembangunan fasilitas umum yang sudah dibangun di Desa Kubang Jaya yaitu posyandu, jalan semenisasi di dusun empat dekat jembatan dan semua 100% terealisasi”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 November 2018 pukul 10.00 WIB dengan Kepala Desa Kubang Jaya. Yakni

Bapak Zulkifli mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Siak Hulu, Beliau menyatakan bahwa :

“Kepala Desa harus mampu bekerja dan membuat suasana stabil dan dapat menekan ketidakstabilan yang timbul di masyarakat desany. Beberapa peran penting yang mesti dilaksanakan oleh kepala desa secara efektif dan efisien sebagai motivator dalam penyusunan rencana yaitu menjaga kestabilan yang ada di desa yang dia pimpin, karena kegiatan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di desa tidak akan dapat berlangsung dengan mantap tanpa adanya stabilitas”.

Dari pertanyaan Kepala Desa Kubang Jaya tersebut dapat dimaknai bahwa setidaknya peran kepala desa harus mampu membuat situasi dan kondisi yang stabil terhadap aparat desa dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sekretaris Desa pada Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 November 2018 pukul 11.30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Kepala desa belum memiliki pola kerja atau kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, mereka berorientasi menerima dari pada memberi karena itu diperlukan kepala desa yang dinamis dan kreatif serta pandai memberikan pembahasan secara teknis dalam setiap rapat penyusunan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien”.

Perencanaan pembangunan desa sebenarnya sudah menjadi agenda rutin yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa setiap tahunnya. Namun demikian ada beberapa hal yang menjadi persoalan bersama yang harus di musyawarahkan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut diatas, maka kepala desa berdiskusi atau bermusyawarah dalam proses perencanaan pembangunan karena perlu adanya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar memahami alur dan tahapan proses perencanaan di desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Kubang Jaya yang dilakukan pada hari Selasa, 06 November 2018 pukul 11.30 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Saya akan berupaya meningkatkan program pembangunan, agar masyarakat betul-betul mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan, serta berkoordinasi dengan semua perangkat desa agar tercapainya rancangan pembangunan di desa. Dalam melaksanakan sarana dan prasarana tidak terlepas dari pembiayaan yang terbatas. Apabila ada kesalahan yang dilakukan perangkat desa maka kepala desa mencari jalan keluar permasalahan dalam pembangunan desa”.

Berdasarkan hasil observasi penulis di desa Kubang Jaya mengenai peranan Kepala Desa dalam pembangunan didapatkan bahwa Dalam melakukan pembangunan di Desa Kubang Jaya, Kepala Desa telah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam kegiatan pembangunan seperti perangkat desa, BPD dan masyarakat sehingga pembangunan yang direncanakan benar-benar tepat sasaran dan masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan. Dalam hal ini, Kepala Desa yang telah bertindak sebagai koordinator dan sudah dapat menyelesaikan berbagai masalah selama aktivitas yang dijalankan untuk program pembangunan.

2. Penetapan Rencana

Untuk terlaksananya peranan kepala desa di lingkungan desa Kubang Jaya, tidak terlepas dari keberadaan seorang pemimpin, dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa pada era otonomi dimana tugas-tugas umum pemerintahan daerah semakin kompleks, maka dituntut adanya pimpinan yang berkualitas dan mampu menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan di wilayah yang dikerjakannya.

Kepala desa merupakan ujung tombak bagi pemerintahan desa, memberikan pelayanan umum serta untuk menyampaikan program-program pemerintah, baik dibidang pembangunan maupun sosial ekonomi. Untuk itu Kepala Desa sudah selayaknya menyelenggarakan administratif yang efektif agar pelayanan umum kepada masyarakat dengan seadil-adilnya.

Pembangunan desa merupakan suatu proses yang berlangsung di desa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan pembangunan nasional yang mencakup segala aspek kehidupan dan penghidup masyarakat tujuan pembangunan hanya dapat tercapai melalui pembangunan yang direncanakan dengan baik dan dilaksanakan secara bertahap dan terarah dengan dengan menggerakkan seluruh potensi yang ada.:

Tabel V.5 Sebaran Tanggapan Responden Terhadap indikator Penetapan Rencana Pada Peranan Kepala Desa dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	2	3	4	5	6
1	Apakah kepala desa menetapkan rencana desa dilakukan dengan musyawarah?	17	14	19	50
2	Apakah Penetapan rencana desa disesuaikan dengan aspirasi masyarakat?	19	24	7	50
3	Apakah Penetapan rencana desa disesuaikan dengan dana APBDes?	24	19	7	50
Jumlah		60	57	33	150
Rata-Rata		20	19	11	50
Persentase (%)		40 %	38%	22 %	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018.

Pada tabel diatas terlihat bahwa hasil tanggapan responden dari 50 orang responden untuk pertanyaan pertama 17 orang menjawab berperan, 14 orang menjawab cukup berperan dan 19 orang menjawab kurang berperan. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua 19 orang menjawab berperan, 24 orang menjawab cukup berperan dan 7 orang menjawab kurang berperan. Kemudian pertanyaan ketiga responden memberikan tanggapan 24 orang menjawab berperan, 19 orang menjawab cukup berperan dan 7 orang menjawab kurang berperan. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa penetapan rencana dijawab oleh sebanyak 20 responden dengan persentase 40%, jawaban cukup berperan sebanyak 19 orang taatau 38% dan kategori kurang berperan 11 orang atau 22%.

Berdasarkan hasil analisis kuisioner yang telah dijawab bahwa para responden memilii peranan kepala desa dalam pembangunan di desa Kubang Jaya, dari ketiga pertanyaan tersebut terlihat bahwa penetapan rencana pembangunan berkategori cuup berperan dengan maksimal makan dua kali.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 November 2018 pukul 10.00 WIB dengan Sekretaris Desa Kubang Jaya. Yakni Bapak Hengky Efriadi, SE mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Siak Hulu, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : *Menurut Bapak/Ibu, pembangunan apa sajakah yang masih dalam proses?*Adapun jawaban dari bapak Hengky Efriadi, SE:

“Untuk pembangunan tahap 3 ini sepertinya belum masuk anggaran”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 November 2018 pukul 11.00 WIB dengan Kepala Desa Kubang Jaya. Yakni

Bapak Zulkifli mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Siak Hulu, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : *Menurut Bapak/Ibu, pembangunan apa sajakah yang masih dalam proses?* Adapun jawaban dari bapak Zulkifli yaitu:

“Pembangunan fasilitas umum yang sedang berjalan hingga saat ini pembangunan semenisasi jalan dusun satu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 November 2018 pukul 11.30 WIB dengan Kaur Pembangunan Kubang Jaya. Yakni Bapak Erianto mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Siak Hulu, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : *Menurut Bapak/Ibu, pembangunan apa sajakah yang masih dalam proses??* Adapun jawaban dari bapak Erianto:

“pembangunan fasilitas umum yang sedang berjalan yaitu semenisasi dan drainase di dusun satu”.

Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai peranan Kepala Desa dalam pembangunan desa Kubang Jaya, khususnya pada Penetapan rencana yaitu penetapan rencana pembangunan dilakukan setelah disetujui oleh Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang desa dengan menghadirkan aparat desa, pendamping desa dan BPD. Dalam melakukan penetapan rencana pembangunan, Kepala Desa telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait atau aparat desa.

3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana

Partisipasi masyarakat merupakan hal terpenting dalam pembangunan desa yaitu sebagai alat guna untuk memperoleh suatu informasi mengenai kondisi dan sikap masyarakat. Masyarakat akan mempercayai program pembangunan di desa

jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaanya dan pengambilan keputusan terhadap proritas pembangunan yang sesuai masyarakat.

Tabel V.6 Sebaran Tanggapan Responden Terhadap indikator Pengendalian Pelaksanaan Rencana pada penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan di desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Item Penilaian Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	2	3	4	5	6
1	Apakah Kepala desa membangun sarana yang belum ada	31	14	5	50
2	Apakah Kepala Desa Kubang Jayapernah melakukan rapat mengenai pembangunan desa	44	3	3	50
3	Apakah Kepala desa melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan ?	31	8	11	50
Jumlah		133	38	29	200
Rata-Rata		34	10	6	50
Persentase (%)		68 %	20 %	12%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018.

Hasil tanggapan responden berdasarkan item penilaian Apakah Kepala Desa sudah melakukan rencana pembangunan, didapatkan hasil bahwa 31 orang atau 62 % responden menjawab baik, 14 orang atau 28% menjawab cukup baik dan 5 orang atau 10 % menjawab kurang baik karena sebagian besar mereka mengetahui bahwa Kepala Desa memang sudah melakukan rencana pembangunan

Hasil tanggapan responden berdasarkan item penilaian Apakah Kepala Desa Kubang Jayapernah melakukan rapat mengenai pembangunan desa,

didapatkan hasil bahwa 44 orang atau 88 % responden menjawab baik, 3 orang atau 6 % menjawab cukup baik dan 3 orang atau 6 % menjawab kurang baik.

Hasil tanggapan responden berdasarkan item penilaian Apakah Apakah Kepala Desa Kubang Jaya pernah menghimbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi, didapatkan hasil bahwa 31 orang atau 62 % responden menjawab baik, 8 orang atau 16 % menjawab cukup baik dan 11 orang atau 22 % menjawab kurang baik.

Hasil tanggapan responden berdasarkan item Apakah Bapak/Ibu sudah merasa puas dengan pembangunan yang dilakukan Kepala Desa Kubang Jaya saat ini, didapatkan hasil bahwa 27 orang atau 54 % responden menjawab baik, 13 orang atau 26 % menjawab cukup baik dan 10 orang atau 20 % menjawab kurang baik.

Pada tabel V.6 dapat dilihat bahwa untuk tanggapan responden terhadap peranan kepala desa dalam pembangunan desa Kubang Jaya indikator peranan faktual adalah berkategori baik dengan jumlah 34 orang atau 68% menyatakan baik, hal ini karena memang sebagian besar responden/masyarakat desa Kubang Jaya mengetahui dan melihat bahwa kepala desa Kubang Jaya sudah berperan faktual sesuai dengan keadaan dilapangan seperti melakukan rapat, koordinasi dengan pihak terkait dan sebagainya...

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 November 2018 pukul 10.00 WIB dengan Sekretaris Desa Kubang Jaya. Yakni Bapak Hengky Efriadi, SE mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Siak Hulu, adapun pertanyaan yang

ditanyakan adalah : *Menurut Bapak/Ibu, Fasilitas umum apa sajakah yang dibutuhkan masyarakat desa kubang jaya?* Adapun jawaban dari bapak Hengky Efriadi, SE:

“Saya pikir masyarakat membutuhkan sarana olahraga namun terkendala lahan atau tanah yang belum ada”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 November 2018 pukul 11.00 WIB dengan Kepala Desa Kubang Jaya. Yakni Bapak Zulkifli mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Siak Hulu, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : *Menurut Bapak/Ibu, Fasilitas umum apa sajakah yang dibutuhkan masyarakat desa kubang jaya?* Adapun jawaban dari bapak Zulkifli yaitu:

“Pembangunan fasilitas umum seperti sarana olahraga, posyandu dan bangunan serbaguna”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 06 November 2018 pukul 11.30 WIB dengan Kaur Pembangunan Kubang Jaya. Yakni Bapak Erianto mengenai Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kubang Jaya Siak Hulu, adapun pertanyaan yang ditanyakan adalah : *Menurut Bapak/Ibu, Fasilitas umum apa sajakah yang dibutuhkan masyarakat desa kubang jaya??* Adapun jawaban dari bapak Erianto:

“pembangunan sekolah tingkat lanjut seperti SMP dan SMA”.

Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai peranan Kepala Desa dalam pembangunan desa Kubang Jaya, khususnya pada pengendalian pelaksanaan rencana yaitu Partisipasi masyarakat merupakan hal terpenting dalam pembangunan desa yaitu sebagai alat guna untuk memperoleh suatu informasi

mengenai kondisi dan sikap masyarakat. Masyarakat akan mempercayai program pembangunan di desa jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya dan pengambilan keputusan terhadap prioritas pembangunan yang sesuai masyarakat.

4. Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah atau desa dapat dinilai dari adanya keselarasan atau terciptanya komunikasi yang baik. Dengan itu hubungan pimpinan dengan bawahan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu program dalam setiap organisasi dan juga membentuk suatu konsep yang mampu bekerjasama yang lebih meningkatkan dari suatu program yang disadari hubungan komunikasi yang baik oleh pimpinan terhadap bawahan dan juga masyarakat.

Sebagai kepala organisasi pemerintahan desa, kepala desa dapat menjelaskan arah dan tujuan organisasi kepada perangkat desa dan masyarakat. Di sisi lain kepala desa dapat membina hubungan yang akrab dan harmonis terbuka dengan perangkat desa.

Evaluasi adalah mengetahui apakah ada perbedaan yang dirasakan dalam meningkatkan tugas kepala desa dalam pembangunan serta mengetahui berapa banyak masyarakat berpartisipasi dari tahun ke tahun berikutnya, sehingga ada beberapa pembangunan yang belum terealisasi. Peranan kepala desa dalam pembangunan di desa Kubang Jaya yang menjadi penilai atau pengukur dalam keberhasilan program pembangunan ialah masyarakat, sebagai pemerintah desa harus siap menerima masukan-masukan dari masyarakat. Dengan dilakukan

evaluasi dari setiap pertemuan, maka kepala desa akan lebih mdah melakukan pembangunan yang harus di prioritaskan untuk masyarakat.

Tabel V.7 Tanggapan Responden Mengenai Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya.

No	Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kepala Desa harus melakukan evaluasi terlebih dahulu	23	13	14	50
2	Kepala desa melakukan perawatan sarana dan prasarana yang ada	21	20	9	50
3	Kepala desa mencari solusi dalam pelaksanaan rencana pembangunan	34	10	6	50
Jumlah		78	43	29	150
Rata-Rata		26	14	10	50
Persentase (%)		52%	29%	19%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018.

Pada tabel diatas terlihat bahwa hasil tanggapan responden dari 50 orang responden untuk pertanyaan pertama 23 orang menjawab berperan, 13 orang menjawab cukup berperan dan 14 orang menjawab kurang berperan. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua 21 orang menjawab berperan, 20 orang menjawab cukup berperan dan 9 orang menjawab kurang berperan. Kemudian pertanyaan ketiga responden memberikan tanggapan 34 orang menjawab berperan, 10 orang menjawab cukup berperan dan 6 orang menjawab kurang berperan. Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa evaluasi pelaksanaan keberhasilan bernilai berperan dengan dijawab oleh sebanyak 26 responden dengan persentase

52%., jawaban cukup berperan sebanyak 14 orang atau 29% dan kategori kurang berperan 11 orang atau 29%.

Berdasarkan observasi penulis mengenai evaluasi pelaksanaan pembangunan yaitu keberhasilan pembangunan disuatu daerah atau desa dapat di evaluasidari adanya keselarasan atau terciptanya komunikasi dengan baik. Dengan itu hubungan pimpinan dengan bawahan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan suatu program dalam setiap organisasi dan juga membentuk suatu konsep yang mampu bekerjasama yang lebih meningkatkan dari suatu program yang disadari hubungan komunikasi yang baik oleh pimpinan terhadap bawahan dan juga masyarakat. Evaluasi pembangunan di desa Kubang Jaya dilakukan dalam pelaporan pembangunan dan evauasi dilakukan untuk dapat membenahi program pembangunan selanjutnya.

Tabel V.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

No	Indikator	Kategori Jawaban			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Penyusunan Rencana	22	14	14	50
2	Penetapan Rencana	20	19	11	50
3	Pengendalian pelaksanaan rencana	34	10	6	50
4	Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Rencana	26	14	10	50
Jumlah		102	57	41	200
Rata-Rata		26	14	10	50
Persentase (%)		51%	28,5%	20,5%	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2018.

Analisis tanggapan berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, terlihat bahwa secara keseluruhan Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya berperan hal ini terlihat dari 26 orang atau sebesar 51% menyatakan bahwa secara keseluruhan indikator Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya termasuk cukup berperan karena berada pada persentase 34-66%.

C. Hambatan-hambatan dalam Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya

Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya yakni :

1. Kurangnya biaya dari APBDes dan belum mendapatkan lokasi yang tepat di desa untuk pembangunan fasilitas umum desa Kubang Jaya.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat kubang jaya dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa Kubang Jaya, hal ini dibuktikan dengan masyarakat desa Kubang Jaya dominan tidak hadir ketika diundang mengadakan rembuk desa atau acara kecamatan lainnya.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan mengenai peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan pembangunan di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan dan saran yaitu:

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya berkategori baik hal ini terlihat dari 26 orang atau sebesar 52 % menyatakan bahwa secara keseluruhan indikator Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya sudah cukup baik karena berada pada persentase 34-66%.
2. Adapun hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Kubang Jaya yakni :
3. Kurangnya biaya dari APBDes dan belum mendapatkan lokasi yang tepat di desa untuk pembangunan fasilitas umum desa Kubang Jaya.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat kubang jaya dalam berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa Kubang Jaya, hal ini dibuktikan dengan masyarakat desa Kubang Jaya dominan tidak hadir ketika diundang mengadakan rembuk desa atau acara kecamatan lainnya.

B. Saran

1. Hendaknya Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desajuga didukung dengan ketersediaan dana dan lahan untuk terciptanya pembangunan yang berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Pada penelitian lanjutan hendaknya dikaji indikator lain yang dapat mengukur Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa.



DAFTAR PUSTAKAAN

Buku-Buku :

- Berry, 2003, *Manajemen Pemasaran*, Bandung, Djaslim Saladin.
- Budiarjo, Mariam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Garamedia Pustaka Utama.
- Dharma, 2002, *Human Resource Scorecard : Suatu Model Pengukuran Kinerja Sumberdaya Manusia*, Amara Books, Yogyakarta.
- Erly Suandy, 2001, *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Hadi, 2000, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Andi Yogyakarta.
- Kusnadi, 2005, *Teori dan Manajemen Konflik*, Malang, Taroda.
- Latif, 2005, *Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan Pada Pemerintahan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lobolo, 2007, *Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Narimawati, Umi. 2007. *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi Beberapa Kontruksi Utama*, Rhineka Sirao Credentia Center, Jakarta.
- Riduwan, 2004, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Richard Rose, Winarno, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo, Jakarta.

Samsul Bachri, 2004, *Akuntansi Manajemen*, Edisi Pertama, Bandung, Kencana Utama.

Soekanto, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo.

Siagian, 2012, *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Jakarta, Bumi Aksara.

Singarimbun, 2005, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES.

Supardi, 1994, *Pembangunan yang Memanfaatkan Sumber Daya*, Jakarta, Rineka Cipta.

Syaffie, Inu Kencana, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Tandjung, 2002, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Tjahja, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta, Rineka Cipta.

Wibawa, 1992, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Eresco, Jakarta.

Widjaja, 2003, *Otonomi Desa*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian (UP), Hasil Penelitian, Skripsi,
Kertas Kerja Mahasiswa (KKM), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Riau 2013. Penerbit Fisipol UIR.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau